



BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ASMAT
NOMOR 398 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR JENJANG SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025

BUPATI ASMAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses administrasi dan penetapan Nomenklatur pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Asmat Tahun 2025 dapat berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Asmat Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 59).

MEMUTUSKAN...../5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nomenklatur Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Asmat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

PENETAPAN NOMENKLATUR JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)
 KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	DISTRIK	STATUS		KETERANGAN	
				NEGERI	SWASTA	NAMA SEBELUNYA	NAMA YANG DIUSULKAN
1	SD INPRES UWUS	60304105	AGATS	NEGERI		SD INPRES UWUS	SD INPRES UWUS
2	SD YPPK YEPEM	60303631	AGATS		SWASTA	SD YPPK YEPEM	SD YPPK St. ANTONIUS DE PADUA YEPEM
3	SD INPRES PER	69932616	AGATS	NEGERI		SD INPRES PER	SD INPRES PER
4	SD NEGERI MBAIT	60303630	AGATS	NEGERI		SD NEGERI MBAIT	SD NEGERI MBAIT
5	SD YPPGI AGATS	60303633	AGATS		SWASTA	SD YPPGI AGATS	SD YPPGI AGATS
6	SD YPPK DON BOSCO EWER	60303634	AGATS		SWASTA	SD YPPK DON BOSCO EWER	SD YPPK DON BOSCO EWER
7	SD YPPK SALIB SUCI AGATS	60303627	AGATS		SWASTA	SD YPPK SALIB SUCI AGATS	SD YPPK SALIB SUCI AGATS
8	SD DARUSSALAM	60304108	AGATS		SWASTA	SD DARUSSALAM	SD DARUSSALAM
9	SD INPRES SYURU	60303749	AGATS	NEGERI		SD INPRES SYURU	SD INPRES SYURU
10	SD INPRES BERITEN	60303932	AGATS	NEGERI		SD INPRES BERITEN	SD INPRES BERITEN
11	SD PERSIAPAN NEGERI MBAIT 2	69979821	AGATS	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI MBAIT 2	SD NEGERI MBAIT 2
12	MI MA'ARIF	70042714	AGATS		SWASTA	MI MA'ARIF	MI MA'ARIF
13	SD INPRES ATSJ	60303714	ATSJ	NEGERI		SD INPRES ATSJ	SD INPRES ATSJ
14	SD INPRES BIPIM	60303718	ATSJ	NEGERI		SD INPRES BIPIM	SD INPRES BIPIM
15	SD INPRES BINE	60303721	ATSJ	NEGERI		SD INPRES BINE	SD INPRES BINE
16	SD INPRES SOGONI	60303731	ATSJ	NEGERI		SD INPRES SOGONI	SD INPRES SOGONI
17	SD INPRES AMBISU	60303722	ATSJ	NEGERI		SD INPRES AMBISU	SD INPRES AMBISU
18	SD YPPK AMANAMKAI	60303723	ATSJ		SWASTA	SD YPPK AMANAMKAI	SD YPPK STA. ROSA AMANAMKAI
19	SD YPPK ATSJ	69787831	ATSJ		SWASTA	SD YPPK ATSJ	SD YPPK St. PAULUS ATSJ
20	SD NEGERI SAWA ERMA	60303746	SAWA ERMA	NEGERI		SD NEGERI SAWA ERMA	SD NEGERI SAWA ERMA
21	SD YPPK YAN SMIT StALOYSIUS MUMUGU II	69787834	SAWA ERMA		SWASTA	SD YPPK YAN SMIT StALOYSIUS MUMUGU II	SD YPPK YAN SMIT StALOYSIUS MUMUGU 2
22	SD INPRES PUPIS	60303756	SAWA ERMA	NEGERI		SD INPRES PUPIS	SD INPRES PUPIS

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	DISTRIK	STATUS		KETERANGAN	
				NEGERI	SWASTA	NAMA SEBELUNYA	NAMA YANG DIUSULKAN
23	SD PERSIAPAN NEGERI SAUTI	69896429	SAWA ERMA	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI SAUTI	SD NEGERI SAUTI
24	SD SATU ATAP	60304740	SAWA ERMA	NEGERI		SD SATU ATAP	SD SATU ATAP SAWA ERMA
25	SD INPRES BUAGANI	60303760	SAWA ERMA	NEGERI		SD INPRES BUAGANI	SD INPRES BUAGANI
26	SD INPRES MUMUGU	69932614	SAWA ERMA	NEGERI		SD INPRES MUMUGU	SD INPRES MUMUGU
27	SD YPPK SAWA ERMA	60303742	SAWA ERMA		SWASTA	SD YPPK SAWA ERMA	SD YPPK KRISTUS AMORE SAWA ERMA
28	SD PERSIAPAN NEGERI CUMNEW	60304982	AKAT	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI CUMNEW	SD NEGERI CUMNEW
29	SD YPPK AYAM	60303646	AKAT		SWASTA	SD YPPK AYAM	SD YPPK St. MARTINUS AYAM
30	SD YPPGI AYAM	60303636	AKAT		SWASTA	SD YPPGI AYAM	SD YPPGI AYAM
31	SD INPRES BECO	60303639	SOR EP	NEGERI		SD INPRES BECO	SD INPRES BECO
32	SD PERSIAPAN NEGERI FAKAN	69896427	SOR EP	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI FAKAN	SD NEGERI FAKAN
33	SD INPRES YUNI	60303643	SOR EP	NEGERI		SD INPRES YUNI	SD INPRES YUNI
34	SD INPRES MANEPSEMINI	60303745	SOR EP	NEGERI		SD INPRES MANEPSEMINI	SD INPRES MANEPSEMINI
35	SD INPRES BEUTKWAR	60303640	SOR EP	NEGERI		SD INPRES BEUTKWAR	SD INPRES BEUTKWAR
36	SD INPRES BIOPIS	60303651	FAYIT	NEGERI		SD INPRES BIOPIS	SD INPRES BIOPIS
37	SD INPRES OCENEP	60303652	FAYIT	NEGERI		SD INPRES OCENEP	SD INPRES OCENEP
38	SD INPRES BASIM	60303648	FAYIT	NEGERI		SD INPRES BASIM	SD INPRES BASIM
39	SD INPRES NANAI	60303649	FAYIT	NEGERI		SD INPRES NANAI	SD INPRES NANAI
40	SD INPRES PIRIEN	60303650	FAYIT	NEGERI		SD INPRES PIRIEN	SD INPRES PIRIEN
41	SD INPRES SANEP	60303775	PANTAI KASUARI	NEGERI		SD INPRES SANEP	SD INPRES SANEP
42	SD INPRES SANAPAI	60303766	PANTAI KASUARI	NEGERI		SD INPRES SANAPAI	SD INPRES SANAPAI
43	SD INPRES SERAMIT	60303765	PANTAI KASUARI	NEGERI		SD INPRES SERAMIT	SD INPRES SERAMIT
44	SD INPRES YAGAMIT	60303783	PANTAI KASUARI	NEGERI		SD INPRES YAGAMIT	SD INPRES YAGAMIT
45	SD PERSIAPAN NEGERI YAHUI	60304937	PANTAI KASUARI	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI YAHUI	SD NEGERI YAHUI
46	SD INPRES KAMUR	60303774	PANTAI KASUARI	NEGERI		SD INPRES KAMUR	SD INPRES KAMUR
47	SD YPPGI KAMUR	60304107	PANTAI KASUARI	NEGERI		SD YPPGI KAMUR	SD YPPGI KAMUR
48	SD YPPGI ELFIS KAMUR MAURO	70045893	PANTAI KASUARI		SWASTA	SD YPPGI ELFIS KAMUR MAURO	SD YPPGI ELFIS KAMUR MAURO
49	SD INPRES JINAK	60304096	SUATOR	NEGERI		SD INPRES JINAK	SD INPRES JINAK

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	DISTRIK	STATUS		KETERANGAN	
				NEGERI	SWASTA	NAMA SEBELUNYA	NAMA YANG DIUSULKAN
50	SD INPRES WOWI	60304106	SUATOR	NEGERI		SD INPRES WOWI	SD INPRES WOWI
51	SD INPRES KARBIS	60304097	SUATOR	NEGERI		SD INPRES KARBIS	SD INPRES KARBIS
52	SD INPRES BINAM	60304415	SUATOR	NEGERI		SD INPRES BINAM	SD INPRES BINAM
53	SD PERSIAPAN NEGERI WAGANU 2	69787835	SUATOR	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI WAGANU 2	SD NEGERI WAGANU 2
54	SD INPRES BURBIS	60304094	SUATOR	NEGERI		SD INPRES BURBIS	SD INPRES BURBIS
55	SD PERSIAPAN NEGERI BUBIS	60304431	SUATOR	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI BUBIS	SD NEGERI BUBIS
56	SD PERSIAPAN NEGERI VAGABUS	69896433	SUATOR	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI VAGABUS	SD NEGERI VAGABUS
57	SD PERSIAPAN NEGERI TII	69896431	SURU SURU	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI TII	SD NEGERI TII
58	SD PERS NEG SURU - SURU	60303739	SURU SURU	NEGERI		SD PERS NEG SURU - SURU	SD NEGERI SURU - SURU
59	SD YPPGI YENUSUKU	70032207	SURU SURU		SWASTA	SD YPPGI YENUSUKU	SD YPPGI YENUSUKU
60	SD INPRES TOMOR	60303628	TOMOR BIRIF	NEGERI		SD INPRES TOMOR	SD INPRES TOMOR
61	SD PERSIAPAN NEGERI ABAMU	60304109	TOMOR BIRIF	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI ABAMU	SD NEGERI ABAMU
62	SD PERSIAPAN NEGERI UJIN AJIN	60304989	TOMOR BIRIF	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI UJIN AJIN	SD NEGERI UJIN AJIN
63	SD INPRES JIVAK	60303752	TOMOR BIRIF	NEGERI		SD INPRES JIVAK	SD INPRES JIVAK
64	SD INPRES MUNU	60303740	TOMOR BIRIF	NEGERI		SD INPRES MUNU	SD INPRES MUNU
65	SD INPRES BINAMZAIN	60304093	KOLOF BRAZA	NEGERI		SD INPRES BINAMZAIN	SD INPRES BINAMZAIN
66	SD INPRES PATIPI	60304098	KOLOF BRAZA	NEGERI		SD INPRES PATIPI	SD INPRES PATIPI
67	SD PERSIAPAN NEGERI PEPERA	60304987	KOLOF BRAZA	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI PEPERA	SD NEGERI PEPERA
68	SD PERSIAPAN NEGERI ULAKIN	60304934	KOLOF BRAZA	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI ULAKIN	SD NEGERI ULAKIN
69	SD INPRES SIPANAP	60304103	KOLOF BRAZA	NEGERI		SD INPRES SIPANAP	SD INPRES SIPANAP
70	SD PERSIAPAN NEGERI WOUTU KOLF	69755575	KOLOF BRAZA	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI WOUTU KOLF	SD NEGERI WOUTU KOLF
71	SD INPRES JIPAWER	60303759	UNIR SIRAU	NEGERI		SD INPRES JIPAWER	SD INPRES JIPAWER
72	SD YPPK KOMOR	60303754	UNIR SIRAU		SWASTA	SD YPPK KOMOR	SD YPPK MARTIR-MARTIR UGANDA KOMOR
73	SD PERSIAPAN NEGERI OMOR	60304114	JOERAT	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI OMOR	SD NEGERI OMOR
74	SD PERSIAPAN NEGERI ONAFAI	69896479	JOERAT	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI ONAFAI	SD NEGERI ONAFAI
75	SD YPPK YAMAS	60303748	JOERAT		SWASTA	SD YPPK YAMAS	SD YPPK ST. YOHANES PEMANDI YAMAS
76	SD YPPK YUFRI	60303629	JOERAT		SWASTA	SD YPPK YUFRI	SD YPPK ST. YOHANES PEMANDI YUFRI

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	DISTRIK	STATUS		KETERANGAN	
				NEGERI	SWASTA	NAMA SEBELUNYA	NAMA YANG DIUSULKAN
77	SD PERSIAPAN NEGERI YENI	69984897	JOERAT	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI YENI	SD NEGERI YENI
78	SD INPRES AOU	60303743	PULAU TIGA	NEGERI		SD INPRES AOU	SD INPRES AOU
79	SD PERSIAPAN NEGERI EROKO	69755574	PULAU TIGA	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI EROKO	SD NEGERI EROKO
80	SD PERSIAPAN NEGERI WEO	60304991	PULAU TIGA	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI WEO	SD NEGERI WEO
81	SD YPPK KAPI	60303762	PULAU TIGA		SWASTA	SD YPPK KAPI	SD YPPK ST. FRANSISKUS XAVERIUS KAPI
82	SD INPRES NAKAI	60303757	PULAU TIGA	NEGERI		SD INPRES NAKAI	SD INPRES NAKAI
83	SD PERSIAPAN NEGERI ESMAPAN	60304992	PULAU TIGA	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI ESMAPAN	SD NEGERI ESMAPAN
84	SD PERSIAPAN NEGERI YAKAPIS	69755573	PULAU TIGA	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI YAKAPIS	SD NEGERI YAKAPIS
85	SD YPPK AS-ATAT	60303751	PULAU TIGA		SWASTA	SD YPPK AS-ATAT	SD YPPK ST. PETRUS AS-ATAT
86	SD PERSIAPAN NEGERI AOUAP	70049622	PULAU TIGA	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI AOUAP	SD NEGERI AOAP
87	SD PERSIAPAN NEGERI FUMERIPITS	7005440	PULAU TIGA	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI FUMERIPITS	SD NEGERI FUMERIPITS
88	SD INPRES PAU	60303635	JETSJ	NEGERI		SD INPRES PAU	SD INPRES PAU
89	SD YPPK AMBOREP	60303641	JETSJ		SWASTA	SD YPPK AMBOREP	SD YPPK STA. AGNES AMBOREP
90	SD YPPK WARSE	60303645	JETSJ		SWASTA	SD YPPK WARSE	SD YPPK WARSE
91	SD INPRES SESAKAM	60303642	JETSJ	NEGERI		SD INPRES SESAKAM	SD INPRES SESAKAM
92	SD PERSIAPAN NEGERI KATEUW	60304976	JETSJ	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI KATEUW	SD NEGERI KATEUW
93	SD INPRES YANKAP	60303782	DER KOMOUR	NEGERI		SD INPRES YANKAP	SD INPRES YANKAP
94	SD INPRES KUMURAI	60303771	DER KOMOUR	NEGERI		SD INPRES KUMURAI	SD INPRES KUMURAI
95	SD PERSIAPAN NEGERI AMARU	60303778	DER KOMOUR	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI AMARU	SD NEGERI AMARU
96	SD PERSIAPAN NEGERI AMKAI	70032564	DER KOMOUR	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI AMKAI	SD NEGERI AMKAI
97	SD INPRES AIRO	60304091	KOPAY	NEGERI		SD INPRES AIRO	SD INPRES AIRO
98	SD INPRES SINIPIT	60304424	KOPAY	NEGERI		SD INPRES SINIPIT	SD INPRES SINIPIT
99	SD PERSIAPAN NEGERI HAHARE	69787833	KOPAY	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI HAHARE	SD NEGERI HAHARE
100	SD PERSIAPAN NEGERI KAIPOM	60304113	KOPAY	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI KAIPOM	SD NEGERI KAIPOM
101	SD YPPGI KAWEM	60303767	KOPAY		SWASTA	SD YPPGI KAWEM	SD YPPGI KAWEM
102	SD INPRES KAIRIN	60303781	SAFAN	NEGERI		SD INPRES KAIRIN	SD INPRES KAIRIN
103	SD INPRES SAFAN	60304099	SAFAN	NEGERI		SD INPRES SAFAN	SD INPRES SAFAN

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	DISTRIK	STATUS		KETERANGAN	
				NEGERI	SWASTA	NAMA SEBELUNYA	NAMA YANG DIUSULKAN
104	SD INPRES SANTAMBOR	60304101	SAFAN	NEGERI		SD INPRES SANTAMBOR	SD INPRES SANTAMBOR
105	SD INPRES YAPTAMBOR	60303769	SAFAN	NEGERI		SD INPRES YAPTAMBOR	SD INPRES YAPTAMBOR
106	SD INPRES SIMSAGAR	60304102	SAFAN	NEGERI		SD INPRES SIMSAGAR	SD INPRES SIMSAGAR
107	SD PERSIAPAN NEGERI EMENE	60304112	SAFAN	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI EMENE	SD NEGERI EMENE
108	SD PERSIAPAN NEGERI SEMENDORO	60304115	SAFAN	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI SEMENDORO	SD NEGERI SEMENDORO
109	SD YPPK BAYUN	60303768	SAFAN		SWASTA	SD YPPK BAYUN	SD YPPK ROH KUDUS BAYUN
110	SD YPPK PRIMAPUN	60303779	SAFAN		SWASTA	SD YPPK PRIMAPUN	SD YPPK HATI KUDUS PRIMAPUN
111	SD YPPGI SAMAN	60303763	SAFAN		SWASTA	SD YPPGI SAMAN	SD YPPGI SAMAN
112	SD PERSIAPAN NEGERI DAMEN	60303735	SIRET	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI DAMEN	SD NEGERI DAMEN
113	SD INPRES BIWAR DARAT	60303729	SIRET	NEGERI		SD INPRES BIWAR DARAT	SD INPRES BIWAR DARAT
114	SD INPRES KAIMO	60303728	SIRET	NEGERI		SD INPRES KAIMO	SD INPRES KAIMO
115	SD INPRES FOS	60303725	SIRET	NEGERI		SD INPRES POS	SD INPRES FOS
116	SD INPRES WAGANU	60303730	SIRET	NEGERI		SD INPRES WAGANU	SD INPRES WAGANU
117	SD INPRES AWOK	60303737	SIRET	NEGERI		SD INPRES AWOK	SD INPRES AWOK
118	SD YPPGI YAOSAKOR	60303716	SIRET		SWASTA	SD YPPGI YAOSAKOR	SD YPPGI YAOSAKOR
119	SD YPPK YAOSAKOR	60303732	SIRET		SWASTA	SD YPPK YAOSAKOR	SD YPPK St.ANNA YAOSAKOR
120	SD INPRES COMORO	60303726	AYIP	NEGERI		SD INPRES COMORO	SD INPRES COMORO
121	SD PERSIAPAN NEGERI KAWET	69787829	AYIP	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI KAWET	SD NEGERI KAWET
122	SD YPPGI MAHUSI	69988095	AYIP		SWASTA	SD YPPGI MAHUSI	SD YPPGI MAHUSI
123	SD INPRES OMANESEP	69787832	BETCBAMU	NEGERI		SD INPRES OMANESEP	SD INPRES OMANESEP
124	SD PERS NEGERI WARKAI	69787830	BETCBAMU	NEGERI		SD PERS NEGERI WARKAI	SD NEGERI WARKAI
125	SD INPRES YOUW	60303717	BETCBAMU	NEGERI		SD INPRES YOUW	SD INPRES YOUW
126	SD PERSIAPAN NEGERI ATAMEC	60304939	BETCBAMU	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI ATAMEC	SD NEGERI ATAMEC
127	SD YPPK BIWAR LAUT	60303727	BETCBAMU		SWASTA	SD YPPK BIWAR LAUT	SD YPPK BIWAR LAUT
128	SD INPRES DAIKOT	60304095	JOUTU	NEGERI		SD INPRES DAIKOT	SD INPRES DAIKOT
129	SD INPRES SOMNAK	60304104	JOUTU	NEGERI		SD INPRES SOMNAK	SD INPRES SOMNAK
130	SD INPRES VAKAM	69862409	JOUTU	NEGERI		SD INPRES VAKAM	SD INPRES VAKAM

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	DISTRIK	STATUS		KETERANGAN	
				NEGERI	SWASTA	NAMA SEBELUNYA	NAMA YANG DIUSULKAN
131	SD PERSIAPAN NEGERI WABAK	69896437	JOUTU	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI WABAK	SD NEGERI WABAK
132	SD INPRES BAGAIR	60303713	ASWI	NEGERI		SD INPRES BAGAIR	SD INPRES BAGAIR
133	SD PERSIAPAN NEGERI TAURO	69896430	ASWI	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI TAURO	SD NEGERI TAURO
134	SD INPRES WIYAGAS	60303712	ASWI	NEGERI		SD INPRES WIYAGAS	SD INPRES WIYAGAS
135	SD PERSIAPAN NEGERI BAGAIR 2	60304951	ASWI	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI BAGAIR 2	SD NEGERI BAGAIR 2
136	SD PERSIAPAN NEGERI PIRAMAT	60304988	ASWI	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI PIRAMAT	SD NEGERI PIRAMAT
137	SD INPRES SAGARE	60303724	AWYU	NEGERI		SD INPRES SAGARE	SD INPRES SAGARE
138	SD INPRES SUAGAI	60303626	AWYU	NEGERI		SD INPRES SUAGAI	SD INPRES SUAGAI
139	SD PERSIAPAN NEGERI MABUL	60304946	KOROWAY BULINOP	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI MABUL	SD NEGERI MABUL
140	SD PERSIAPAN NEGERI BAYGON	69896417	KOROWAY BULINOP	NEGERI		SD PERSIAPAN NEGERI BAYGON	SD NEGERI BAYGON

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ISMAIL, S.H.
PEMBINA

NIP. 19781209 201104 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemda 04 No. 15 Distrik Agats 99777
Email : email@dikmudora-asmatkab.org | Website: <http://dikmudora-asmatkab.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASMAT
NOMOR 200 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI ATAMEC
KABUPATEN ASMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua;
- b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- e. Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum efektif dan belum menunjukan angka yang signifikan, mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua maupun dengan daerah lainnya di Indonesia;
- f. Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan melalui pendidikan yang bermutu sehingga perlu melaksanakan yang bernilai unggul Asmat;
- g. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Asmat perlu adanya Ijin Operasional sekolah;

h. Bahwa berdasarakan /2

- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, f, dan g, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

9. Undang-Undang...../3

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Asmat Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 59).

MEMUTUSKAN...../5

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri Atamec Kabupaten Asmat untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan tingkat dasar mulai Tahun Ajaran 2025/2026.
- KEDUA** : Sekolah Dasar (SD) Negeri Atamec Kabupaten Asmat beralamat di Distrik Betsbamu dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Dasar (SD) Negeri Atamec Kabupaten Asmat wajib menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan serta melaporkan pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat secara berkala.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini di kemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal, 9 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Asmat,



BARBALINA TOISUTA, SE., M.Pd
PENMUDA Tk.1
NIP. 19720628 199305 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan di Merauke;
2. Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
3. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
4. Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats;
6. Pertinggal.